

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

#### **Pembina**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### **Pengarah**

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
Kepala Pusat Pengkaji dan Pengembangan Kebijakan

#### **Pemimpin Umum**

Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

#### **Pemimpin Redaksi**

Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

#### **Anggota Dewan Redaksi**

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)  
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)  
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)  
Nevey Varida Ariani, SH., M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)  
Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)  
Muhaimin, S.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

#### **Redaksi Pelaksana**

Fitriyani, S.H., M.Si.

#### **Sekretariat**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P  
Asmadi, S.H.

#### **Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.  
Lindung Budi Mulyawan, S.H.  
B. Lora Christyanti, S.IP.

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

**MitraBestari**

1. Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Hukum Pidana)
2. Prof. Dr. Tata Wijayanta S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Hukum Perdata)
3. Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (HAN, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan)
4. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (Hukum Internasional)
5. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya Jakarta (Sosiologi Hukum)

**Alamat Redaksi:**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email:**

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail.com

**Percetakan PT Pohon Cahaya**

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440  
Telpon (021) 56(8)111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, dengan memperhatikan Pedoman Penulisan Naskah dan *di-submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id)

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ADVERTORIAL</b> .....	<b>v</b>
<b>KUMPULAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika ( <i>Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts</i> ).....	(259-268)
<b>Riki Afrizal, Upita Anggunsuri</b>	
Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun: Studi Kasus Provinsi Bali ( <i>Citizenship Issue of the Children Who Have Passed 21 Years Old of Age (Case Study in the Province of Bali)</i> ) .....	(269-284)
<b>Ahyar Ari Gayo</b>	
Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya ( <i>Enforcement of Maritime Security in the Unitary States of the Republic of Indonesia and Problems Thereof</i> ).....	(285-302)
<b>Suharyo</b>	
Implementasi Poros Maritim dalam Perspektif Kebijakan ( <i>Maritime Axis in the Perspective of Policy Making</i> ).....	(303-322)
<b>Muhar Junef</b>	
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan  ( <i>Application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 23 Of 2018 Regarding Harmonization of the Drafts of the Regulations of Ministers, Non-Ministry Government Agencies or Non-Structural Agencies by the Laws Drafter</i> ).....	(323-338)
<b>Firdaus; Donny Michael</b>	
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan <i>Virtual Currency</i> Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang) ( <i>Juridical Review of Legal Certainty of Virtual Use Currency in Electronic Transactions (In Terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currency)</i> ).....	(339-348)
<b>Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari</b>	
Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana ( <i>Problematic Procedures of Remedy Enforcement in Criminal Cases</i> ).....	(349-360)
<b>Yuliyanto</b>	

Hegemoni Melalui Regulasi *Virus Sharing* Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia  
(*Hegemony Through International Virus Sharing Regulation: Case Study of Indonesian Avian Flu Type a Virus (H5N1)*) .....(361-383)

**Sarah**

Perbandingan Konsep Pemilihan Jabatan Publik BPK Atau *SAI* Di Beberapa Negara Untuk Mewujudkan BPK yang Independen  
(*Comparison of Appointment Concepts of the Supreme Audit Institution Members in Some Countries in Order to Create Independent BPK*)..... (385-403)

**Widhya Mahendra Putra**

<b>BIODATA PENULIS</b> .....	i
<b>PEDOMAN PENULISAN</b> .....	xix

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 19 di tahun 2019.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 tahun 2019 ini, khususnya Volume 19 Nomor 3 September 2019, memuat sembilan tulisan dari berbagai instansi lembaga penelitian maupun institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam edisi kali ini, Jurnal Penelitian Hukum De Jure mengangkat berbagai tema aktual yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, permasalahan status kewarganegaraan, kemaritiman, Implementasi Permenkumham, transaksi elektronik, ganti kerugian, regulasi virus sharing internasional, dan pemilihan konsep jabatan publik.

Menilik persoalan-persoalan hukum yang aktual dan masih merupakan tahun politik yang terus berlanjut, sehingga hukum yang diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keadilan menjadi hilang di tengah masyarakat. Menyikapi hal-hal tersebut di atas Redaksi Jurnal Hukum De Jure, dalam penerbitan edisi ini menerbitkan tema-tema tulisan dari berbagai hasil penelitian, kajian dan tema mandiri yang aktual yang salah satunya kiranya dapat menjadi masukan bagi para pihak-pihak sebagai penyempurnaan perubahan peraturan perundang-undangan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**, Kementerian Hukum dan HAM RI dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan membantu dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Tim Dewan Redaksi dan Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta, September 2019

HALAMAN KOSONG

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.**

**This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

**Riki Afrizal, Upita Anggunsuri**

***Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 259-268*

*Article 54 of the Law No. 35 of 2009 regarding Narcotics provides for that drug addicts and victims of drug abuse must undergo medical and social rehabilitations. Further, Article 127 clause (3) of the Law provides for that in the cases where the addict has been proved or evidenced to be a victim of drug abuse, the addict must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The regulation brings opportunities for the people who are being involved in any legal proceedings related to narcotics to apply for the medical rehabilitation and social rehabilitation procedures. Whether their applications will be approved or not will depend on the assessment. This assessment plays an important role in determining whether a drug addict may be admitted to the rehabilitation processes or not. This research discusses the issues on: 1) the assessment processes of the drug addicts during the investigation and prosecution stages, 2) how to coordinate the investigators and public prosecutors with the medical rehabilitation and social rehabilitation institutions. The method employed in this research is sociological juridical research. This research is descriptive with qualitative data analysis. The results demonstrate that the drug addicts being involved in a criminal case during the investigation or prosecution stages may be admitted to the medical rehabilitation and social rehabilitation processes only after passing the assessment. The assessment will be conducted by an Integrated Assessment Team consisting of a Legal Team and a Doctor Team. The Integrated Assessment Team will determine whether or not a suspect or offender of drug abuse is only a drug addict or serves also as a drug dealer. The Medical Team will make some examination or tests on the drug level and severity of the addict. If the Integrated Assessment Team after the examinations decides that the addict may be admitted to the medical rehabilitation program, the suspect or the offender of drug abuse will be handed over to a rehabilitation institution. The coordination between the investigators or public prosecutors and the medical rehabilitation institutions will be established from the early stage of hand over, implementation, until the return of the addict to the investigator or public prosecutor. If the suspect or offender is under the rehabilitation program as an outpatient, the discretion to make the suspect or offender under the rehabilitation program present, lies on the institution that admits the suspect or offender into the program (the investigator or public prosecutor).*

**Keywords: assessment; medical rehabilitation; drug abuse**

**Ahyar Ari Gayo**

***Citizenship Issue of the Children Who Have Passed 21 Years Old of Age (Case Study in the Province of Bali)***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 269-284*

*The Law No. 12 of 2006 regarding Citizenship provides for that the age of 21 years is the age limit for a person to choose the citizenship of their own. 21 years of age is the ideal age for such purpose. While at the age of 21 years old a child is still in unstable condition to make his or her own choice. This research is to figure out whether or not 21 years of age is the right time to choose citizenship for the children born to mixed marriages. The method used in this research is an empirical legal research method with a qualitative approach. With this type and approach of research, the researcher has gathered data and information to get the depiction of the issue. The results show that it is very difficult for children at the age of 21 years to choose their own citizenship, since at that age children are still unstable and most of the children are still going to schools or universities in their parents' countries of origin. For this reason, the provisions of the Law No. 12 of 2006 regarding Citizenship that provides for the age limit of 21 years, need to be changed to the age limit of 24-25 years.*

**Keywords: mixed marriage; citizenship; child**

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

**Suharyo**

***Enforcement of Maritime Security in the Unitary States of the Republic of Indonesia and Problems Thereof***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 285-302*

*Enforcement of the maritime security in the territory of the Unitary States of the Republic of Indonesia (NKRI), is a manifestation of the rule of law and the sovereignty of the territorial waters of NKRI. The Republic of Indonesia has 17,499 islands, with a sea area of 5.8 million km<sup>2</sup> has still been facing some problems in materializing its maritime security and law enforcement at sea. First, why the law enforcement of maritime security in the NKRI has not been optimized, and second, what efforts should we make to optimize this law enforcement of maritime security. The method employed is normative juridical research. Maritime crimes are highly diversified, the crimes that always happen here are fish theft and various other crimes. The unsettled delineation of Indonesian boundaries with the other neighboring countries at some points has made the law enforcement against the fish theft and others crimes more difficult. In the globalization era, like now and in the future, Indonesia is facing not only the crimes at sea that are still rampant, but also disputes over sea borders with neighboring countries, as well as sea reclamation from Singapore that has the potential to change its boundaries with Indonesia and Malaysia. NKRI as the largest unitary states in the world, must be able to maintain and enforce its maritime security. Covenants on sea boundaries with neighboring countries must not be allowed to drag on. Relevant agencies, from the Ministry of Foreign Affairs and other agencies, must quickly respond to these covenants with the neighboring countries by strengthening the facilities and infrastructure, human resources, budgets and consistent state policy.*

**Keywords: maritime security of the Republic of Indonesia**

**Muhar Junef**

***Maritime Axis in the Perspective of Policy Making***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 303-322*

*The maritime axis is now increasingly popular and has attracted the attention of many parties, including the mass media, who also often use the term in its news nowadays. The emerging term cannot be separated from the idea of the President Joko Widodo who intends to make Indonesia a global maritime axis, and also to make Indonesian waters as a world-class safe waters for all marine activities, and for such purpose the government will guarantee the security and safety of sea transportation by the people and business doers. The maritime axis cannot be developed instantly. To optimize the development at the national, regional and global levels, and especially in achieving the World Maritime Axis, require direction, orientation, strategies in anticipation of effective, consistent and sustainable development. Therefore, the researcher looks at the implementation of the Maritime Axis in the perspective of policy making. The issues on which this research is focusing are, firstly, the concept development of the world maritime axis in Indonesia, secondly, the implementation of the Indonesian maritime axis from the policy making point of view. The purpose of this study is to determine the concept development of the world maritime axis in Indonesia and its implementation. According to the results of the research, Indonesia has already implemented the concept of world maritime programs by issuing policies and their implementation; It is recommended that Indonesia must have a global maritime axis law to answer the challenges in order to materialize the Indonesian superiority. The use of this research is in order to support the creation and development of the laws and in practice as input for the stakeholders including the Government, experts, academics, practitioners and the community.*

**Keywords: maritime axis; policy; and implementation**



The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Firdaus; Donny Michael**

***Application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 23 Of 2018 Regarding Harmonization of the Drafts of the Regulations of Ministers, Non-Ministry Government Agencies or Non-Structural Agencies by the Laws Drafter***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 323-338*

*The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 23 of 2018 regarding Harmonization of the Draft of Regulations of the Ministers, Non-Ministry Government Agencies and Non-Structural Agencies by the Law Drafter has given a raise to some pros and cons. One of the cons addresses that this Regulation of the Minister of Law and Human Rights was considered against the Law No. 12 of 2011 regarding the Establishment Legislations. The questions raised by this research are: (i) whether or not the establishment has been in compliance with the existing legislation and (ii) the effectiveness of the implementation. The objectives of this research are: (i) to confirm the validity of its establishment process; and (ii) to find out whether the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 23 of 2018 has been effected in connection with the harmonization of the drafts of regulations of the ministries and other agencies by the drafters of legislations. According to the research, a fact has been disclosed that the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 23 of 2018 has been contradicting against the higher laws and regulations and the harmonization of legislations limited up to the laws and President Regulations. This research is a normative legal research with juridical descriptive analysis, while this research systematically describes the entire issues of the researched object by analyzing the collected data, both primary legal data and secondary legal data. This study also employs empirical research methods, in which this research also analyzes the implementation of material law applied to the legal subjects.*

***Keywords: implementation; regulation; harmonization; effectiveness***

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.**

**This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

**Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari**

***Juridical Review of Legal Certainty of Virtual Use Currency in Electronic Transactions (In Terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currency)***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 339-348*

*Bank Indonesia has banned the use of virtual currency as legitimate payment instrument since 2014, but the development of Bitcoin usage is still rampant. Formulation problem of this research is (1) how the legal protection and legal certainty of using virtual currency in electronic transactions? This research uses qualitative research with empirical juridical type legal research, where implementation of legal research is associated with normative legal provisions on any particular legal event that occurs in society. Virtual currency usage in electronic transactions as payment has legal certainty according Article 21 paragraph (2) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 1541 of the KUHPperdata. The use of virtual currency also violates the law based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, PBI No. 17/3/PBI/2015 concerning Obligation to Use Rupiah in Territory of the Republic of Indonesia and Article 34 PBI 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processin. The conclusion is that virtual currency usage can be detrimental because of uncertain value, but still has the opportunity for transactions according Article 1542 KUHPperdata. Suggestions for the government are expected to have special arrangements relating to the circulation of virtual currency and users must be more careful in using virtual currency.*

**Keywords: legal certainty; virtual currency and electronic transactions**

**Yuliyanto**

***Problematic Procedures of Remedy Enforcement in Criminal Cases***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 349-360*

*There are still cases of wrongful arrests or procedural errors in criminal cases that cause innocent people have their rights prejudiced, therefore the Government must indemnify the prejudiced rights of the victims. This study addresses the issue of the procedures for the remedies that are considered fair for the victims of wrongful arrest. This study is descriptive analytic intended to reveal the real problem or situation or event in order to reveal the actual facts. Data are obtained from interviews, questionnaires, legislation and literature. Based on the results of the research, the followings are highly recommended: first, it is necessary to facilitate easy determination of the remedy, consequently the remedy determination process should be made quick. Judges need to determine the amount of the remedy payable by the State to the victims of wrongful arrest/wrongful procedures, so that victims do no longer need to initiate any claim for such remedy. Second, the payment mechanism, should remain be payable through the Ministry of Finance, in this regard, the Ministry of Finance needs to prepare guidelines for the purpose of accelerating the disbursement process of the determined remedy amount. As the currently applicable guidelines / regulations are still the Minister of Finance Regulation No. 983 / KMK.01 / 1983.*

**Keywords: procedure; remedy; criminal case**

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.**

**This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

### **Sarah**

#### ***Hegemony through International Virus Sharing Regulation: Case Study of Indonesian Avian Flu Type A Virus (H5N1)***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 361-383*

*Indonesia is a country with a high level of flora and fauna biodiversity, and its diseases. The Avian Influenza Type A Virus (H5N1) outbreak in Indonesia is an interesting case to study. There has been indication of violations committed by international culprits against regulations related to the access and benefit sharing. The problem has been made worse by the discovery of a virus sample sent by Indonesia but ends up in the hands of the United States through the Los Alamos Laboratory. That's why there is an allegation that the H5N1 Virus case that occurred in Indonesia is a form of hegemony by means of the emerging regulations, the Convention on Biological Diversity and the Law No. 13 of 2016 regarding Patents. This research uses qualitative methods and is analyzed by means of two theories, the hegemony and international regimes theories. The results of this study explain how an international regime could reflect the hegemony of a developed country. This research also describes some reasons why this hegemony issue reached Indonesia when the H5N1 Virus outbreak occurred in Indonesia.*

**Keywords: H5N1 virus; virus sharing mechanism; hegemony; international regime; Indonesia**

### **Widhya Mahendra Putra**

#### ***Comparison of Appointment Concepts of the Supreme Audit Institution Members in Some Countries in Order to Create Independent BPK***

*Law Research Journal De Jure, 2019 September, Volume 19, Number 3, Page 385-403*

*According to laws and regulations, the members of the Supreme Audit Board (BPK) are appointed by the House of Representatives (DPR), by taking into account the opinions of the Regional Representative Council (DPD), which in this case is represented by its Consultative Board. However, the regulation of Article 23E clause (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia provides for that the BPK must be an independent state institution. The sole involvement of the House of Representatives as a legislative body in the appointment of the BPK leaders has been considered as burdened with political interests and that may influence the independence of the BPK. This research studies the appropriate DPR's powers in the appointment process of public officials of state institutions and comparing the appointment process of the leaders of the Indonesian supreme audit institution (BPK) in 20 countries. This research is conducted using a juridical-normative method by referring to the laws and regulations applicable in Indonesia as well as the constitutions of comparable countries. The analysis of this paper has a comparative scope related to the appointment concepts of the BPK leaders and the involvement of state's high institutions in appointment process of BPK leaders. The results indicate that appointment process of the BPK leaders should involve more than one state institution in order to maintain the principle of checks and balances among the institutions and at the same time the independence of the audit institution. This paper is expected to serve as a feedback for the policy makers in the appointment process of the leaders of the Indonesian Supreme Audit Board in the future.*

**Keywords: DPR; BPK leaders; independence; comparison of supreme audit institution**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Riki Afrizal, Upita Anggunsuri**

**Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 259-268

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya pasal 127 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Bagaimanakah proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan, 2) Bagaimanakah koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalahguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Koordinasi antara penyidik atau penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dapat dilihat dari awal penyerahan, pelaksanaan, hingga penyerahan kembali kepada penyidik atau penuntut umum. Khusus untuk rehabilitasi yang dilaksanakan dengan rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa yang direhabilitasi ada pada lembaga yang menyerahkan (penyidik atau penuntut umum).

**Kata kunci: asesmen; rehabilitasi medis; penyalahgunaan narkotika**

**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Ahyar Ari Gayo****Problematika Status Kewarganegaraan Anak melampaui Batas Usia 21 Tahun: Studi Kasus Provinsi Bali**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 269-284

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan bahwa usia 21 tahun adalah batas usia untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Ketentuan 21 Tahun tersebut apakah usia ideal bagi anak untuk menentukan pilihannya memilih kewarganegaraannya. Di sisi lain di usia 21 tahun anak masih dalam kondisi labil untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran apakah usia 21 tahun waktu yang tepat untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya bagi anak hasil perkawinan campur? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan jawaban persoalan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sangat sulit bagi anak dalam usia 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya, karena dalam usia tersebut anak masih labil dan sebagian besar anak tersebut masih menempuh pendidikan di negara asal orang tuanya. Untuk itu, Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur batas usia 21 tahun perlu di rubah menjadi sampai batas usia 24 – 25 tahun.

**Kata kunci: perkawinan campur; kewarganegaraan; anak****Suharyo****Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 285-302

Penegakan keamanan maritim dalam wilayah NKRI, merupakan perwujudan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah laut teritorial NKRI. Eksistensi NKRI yang mempunyai 17.499 pulau, dengan wilayah laut 5,8 juta km<sup>2</sup> masih terkendala dalam merealisasikan keamanan maritim dan penegakan hukum di laut. Sebagai permasalahan, pertama, mengapa penegakan hukum keamanan maritim dalam wilayah NKRI belum optimal, kedua, upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan agar penegakan hukum terhadap keamanan maritim dapat optimal. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Kejahatan di laut sangat beragam, yang selalu terjadi adalah pencurian ikan dan berbagai kejahatan lainnya. Belum tuntasnya batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga di beberapa titik, menyebabkan kejahatan pencurian ikan dan yang lainnya menjadi sulit untuk penegakan hukumnya. Dalam era globalisasi seperti sekarang dan dimasa mendatang, masih diwarnai berbagai kejahatan di laut, belum termasuk sengketa batas wilayah laut dengan negara tetangga, serta reklamasi laut dari Singapura yang berpotensi merubah batas wilayah laut dengan Indonesia dan Malaysia. NKRI sebagai negara kesatuan terbesar di dunia, harus mampu menjaga dan menegakkan keamanan maritim dalam NKRI. Perjanjian garis batas laut dengan negara tetangga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Instansi terkait mulai dari Kementerian Luar Negeri dan instansi lainnya harus cepat merespon perjanjian perbatasan laut dengan negara tetangga. Penguatan sarana dan prasarana, SDM, penganggaran, dan konsistensi serta kebijakan negara.

**Kata kunci: keamanan maritim NKRI**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Muhar Junef**

**Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 303-322

Poros maritim kini semakin populer dan menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali media massa yang juga kerap memunculkan istilah tersebut dalam pemberitaannya dalam waktu-waktu belakangan ini. Mengemukanya istilah tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang aman di dunia bagi semua aktivitas laut, dan untuk itu pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Pembangunan maritim tidak bisa dilakukan serba instan. Untuk mengoptimalkan pembangunan maritim di tingkat nasional, regional dan global, dan khususnya dalam mencapai Poros Maritim Dunia dibutuhkan arah, orientasi, strategi dan antisipasi pembangunan yang efektif, konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Peneliti melihat Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif kebijakan. Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia, kedua bagaimana implementasi poros maritim Indonesia dari prespektif kebijakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia dan implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indonesia sudah menerapkan konsep poros maritim dunia dengan mengeluarkan kebijakan dan implementasinya; disarankan Indonesia mempunyai undang-undang poros maritim dunia untuk menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendukung pembentukan dan pengembangan hukum dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.

**Kata kunci: poros maritim; kebijakan; dan implementasi**

## Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

## Firdaus

**Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 323-338

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan telah menuai pro dan kontra. Salah satu kontra adalah bahwa Permenkumham ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah pembentukannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? dan (ii) Bagaimana efektivitas pelaksanaannya? Tujuan penelitian ini adalah: (i) untuk mengetahui keabsahan proses pembentukannya; dan (ii) untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 terkait pengharmonisasian peraturan rancangan kementerian dan lembaga oleh perancang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, maka ditemukan fakta bahwa Permenkumham No.23 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan limitasi sampai pada tingkatan undang-undang hingga Peraturan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh baik data hukum primer dan data hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris, di mana penelitian ini menganalisis implementasi hukum materil yang diberlakukan kepada subjek hukum.

**Kata kunci: implementasi; peraturan; harmonisasi; efektivitas****Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari****Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan *Virtual Currency* dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 339-348

Bank Indonesia melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran yang sah sejak 2014, namun perkembangan penggunaan *Bitcoin* masih marak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan *virtual currency*? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian hukum implementasi dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan *virtual currency* dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata. Penggunaan *virtual currency* melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Simpulan penelitian ini bahwa penggunaan *virtual currency* dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata. Saran bagi pemerintah diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan peredaran *virtual currency* dan pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan *virtual currency*.

**Kata kunci: kepastian hukum; *virtual currency*; dan transaksi elektronik**

## Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Yuliyanto

**Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 349-360

Masih adanya kasus salah tangkap atau kesalahan prosedur dalam perkara pidana menyebabkan orang yang tidak bersalah harus berkurang haknya, oleh sebab itu Pemerintah harus menggantikan hak dari korban yang berkurang tersebut. Kajian ini menjawab permasalahan bagaimana tata cara eksekusi ganti kerugian yang dirasa adil bagi korban salah tangkap. Pengkajian ini bersifat deskriptif analitik yang ditujukan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Data diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, peraturan perundang-undangan dan literature. Dari hasil pengkajian direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: pertama, perlu dipermudah pemberian ganti kerugian, oleh karena itu proses ganti kerugian ini lebih baik melalui proses yang cepat. Hakim perlu menetapkan besaran kerugian yang harus dibayarkan oleh Negara kepada korban salah tangkap/salah prosedur tersebut, sehingga korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan ganti kerugian. Kedua, mekanisme pembayaran ganti kerugian, tetap harus dibayarkan melalui Kementerian Keuangan, terkait hal ini, Kementerian Keuangan perlu membuat pedoman dalam rangka mempercepat proses pencairan ganti kerugian. Karena pedoman/aturan yang ada saat ini masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.

**Kata kunci: tata cara; ganti kerugian; perkara pidana**

Sarah

**Hegemoni melalui Regulasi Virus Sharing Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5n1) Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 361-383

Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas yang tinggi akan keanekaragaman flora dan fauna, serta penyakitnya. Virus Flu Burung A (H5N1) yang terjadi di Indonesia merupakan kasus penyakit yang menarik untuk dikaji. Di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor internasional terhadap regulasi yang berkaitan dengan *access and benefit sharing*. Masalah semakin diperparah dengan ditemukannya sampel virus yang dikirim Indonesia ternyata berada di tangan Amerika Serikat melalui Laboratorium Los Alamos. Oleh karena itulah, adanya dugaan bahwa kasus Virus H5N1 yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk hegemoni melalui regulasi yang tercipta, yaitu *Convention on Biological Diversity* dan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan dua macam teori yakni hegemoni dan rezim internasional. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana sebuah rezim internasional bisa mencerminkan hegemoni negara maju. Penelitian ini juga memaparkan beberapa penyebab bagaimana hegemoni bisa sampai menduduki Indonesia saat kasus Virus H5N1 terjadi di Indonesia.

**Kata kunci: virus H5N1; mekanisme virus *sharing*; hegemoni; rezim internasional; Indonesia**



**Kata kunci bersumber dari artikel**

**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Widhya Mahendra Putra**

**Perbandingan Konsep Pemilihan Jabatan Publik BPK Atau SAI di beberapa Negara untuk Mewujudkan BPK yang Independen**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Halaman 349-360

Menurut peraturan perundang-undangan, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh DPR dengan memperhatikan pandangan DPD yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Musyawarah. Sementara itu, pengaturan di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa BPK harus menjadi lembaga negara yang mandiri. Keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif yang secara tunggal menentukan pimpinan BPK, dinilai sarat akan kepentingan politis dan mempengaruhi independensi atau kemandirian BPK. Studi ini meneliti bagaimana kewenangan DPR yang seharusnya dalam proses pemilihan pejabat publik lembaga negara dan membandingkan proses pemilihan pimpinan supreme audit institution (BPK) di 20 negara. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis-normatif dengan mengacu pada hukum dan peraturan di Indonesia dan konstitusi negara-negara yang diperbandingkan. Analisis makalah ini memiliki ruang lingkup perbandingan terkait dengan konsep pemilihan pimpinan BPK dan keterlibatan lembaga-lembaga tinggi negara dalam pemilihan pimpinan BPK tersebut. Hasil dari perbandingan menunjukkan, pemilihan pimpinan BPK memerlukan lebih dari satu lembaga negara untuk menjalankan prinsip check and balances antar lembaga dan menjaga kemandirian lembaga audit suatu negara. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menunjuk pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia di masa depan.

**Kata kunci: DPR; pimpinan BPK; kemandirian; perbandingan *supreme audit institution***

HALAMAN KOSONG